



No.Dokumen : PED/PKM-SPMI/E.04
SK No : 023.C/SK/AKPER YKY/IX/2018

**BUKU PEDOMAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**AKADEMI KEPERAWATAN
“YKY”
YOGYAKARTA**



YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"

KAMPUS : JL. PATANGPULUHAN, SONOSEWU, NGESTIHARJO
KASIHAN, BANTUL, YOGYAKARTA TELP./FAX.(0274) 450691
SK BAN-PT : NOMOR.293/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015
SK LAM-PTKes : NOMOR.0032/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA NOMOR : 043.A/SK/AKPER YKY/XII/2018

TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat (Pengabmas) yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan Pedoman Pengabmas
2. Bahwa dalam rangka penerapan pengabdian kepada masyarakat yang menjamin terselenggaranya proses penelitian yang kondusif diperlukan pedoman.
3. Bahwa penerapan Pedoman Pengabmas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. SK.Men.Kes No.00.06.1.1.1141 tertanggal 11 April 1995 tentang izin sementara kepada Yayasan Keperawatan Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendirikan AKPER "YKY" di Yogyakarta.
2. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
6. SK LAMP PT Kes Nomor : 0032/LAM-PT-Kes/Akr/Dip/1/2017 tertanggal 29 Januari 2017 tentang STATUS NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN YKY YOGYAKARTA
- Memperhatikan : Surat Keputusan Yayasan Keperawatan Yogyakarta No. 69/Yayasan-YKY/XII/2015 tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA
TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI
KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA**
- Kedua : Pemberlakuan Pedoman Pengabmas di Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta
- Ketiga : Apabila dikemudian hari surat keputusan ini terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2018
Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta
Direktur



Tri Arini, S.Kep.Ns, M.Kep
NIK : 1141 03 052

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**AKADEMI KEPERAWATAN
"YKY" YOGYAKARTA
2018**

VISI AKPER YKY YOGYAKARTA

Menjadi institusi pendidikan keperawatan yang menghasilkan perawat yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038

MISI AKPER YKY YOGYAKARTA

1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan berkualitas, terkini, dan unggul dalam keperawatan keluarga
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek keperawatan/kesehatan
3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (*good academic governance*) dan sumber daya profesional berdasarkan iptek
4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika
5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pelaksanaan Penabdian masyarakat Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta mengikuti Rencana Induk PkM (RIP) Unit PkM dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) yang menjelaskan tentang kebijakan dan mekanisme singkat pengelolaan Riset/PkM dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu dari buku Panduan Pelaksanaan PkM Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018. Akademi Keperawatan YKY menerapkan aturan termasuk penjelasan tata cara pengajuan, seleksi proposal, dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatannya. Salah satu pendanaan PkM didanai dari Yayasan Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta. Kami menyadari bahwa kemampuan keuangan dalam rangka mendukung Program PkM dan Pengabdian Pada Masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menjawab banyaknya persoalan-persoalan bangsa. Oleh karena itu upaya-upaya kreatif Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta juga memerlukan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lain baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta lainnya.

Meskipun buku Pedoman Pelaksanaan pengabdian masyarakat Institusi Akper YKY Yogyakarta ini ditulis secara sederhana namun sudah mengarah untuk mengikuti tema-tema riset yang diacu dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan terminologi baru *Technology Readiness Level* (*TRL*) juga mulai digunakan dalam memetakan riset yang dikaitkan dengan kesiapan teknologinya dalam rangka mendukung program hilirisasi hasil riset.

Atas terselesaikannya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan atas sumbangsihnya sehingga sampai dengan selesai penerbitannya.



Yogyakarta, 21 Desember 2018

Direktur,

Tri Arini, S.Kep.,Ns., M.Kep
NIK. 1141 03 052

DAFTAR ISI

Cover		
Visi dan Misi Akper “YKY” Yogyakarta		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Dasar Pemikiran	1
	B. Dasar Hukum	3
	C. Tujuan	4
	D. Ruang Lingkup	4
BAB II	KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	
	A. Arah Kebijakan PkM	5
	B. Sifat dan Ruang Lingkup	5
	C. Pembinaan Dosen	6
	D. Ketentuan Umum PkM	6
	E. Dana PkM	6
	F. Jangka Waktu PkM	7
	G. Reviewer PkM	7
	H. Sistem Penilaian	8
	I. Monitoring dan Evaluasi Proses PkM	9
	J. Publikasi Hasil PkM	9
	K. Pola Kerjasama dengan Pihak Luar	10
	L. Penanganan Plagiasi	10
BAB III	SKEMA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL PkM	
	A. PkM Institusi	13
	B. Pengabdian Desa Mitra Mono Disiplin Ilmu	14
	C. Pengabdian Desa Mitra Multi Disiplin Ilmu	14
	D. Pengabdian Institusi Mitra	15
	E. Pengabdian Kolaborasi Nasional	15
BAB IV	SISTEMATIKA DAN MUATAN PROPOSAL PkM	16
BAB V	KAIDAH PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN PkM	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Akademi Keperawatan (AKPER) YKY adalah institusi milik Yayasan Keperawatan Yogyakarta dengan Akte Notaris No 292, dan mulai beroperasi berdasarkan SK Pusdiknakes Depkes RI Nomor ; HK.00.06.1.1.1141. tgl 11 April 1995 sampai sekarang . Sebagai Akademi Keperawatan yang sudah cukup lama berdiri, Akper YKY Yogyakarta telah memiliki reputasi dan citra yang baik, hal ini dapat dirasakan dengan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Salah satu cita cita Akper YKY Yogyakarta dalam pengembangan pola akademik adalah menjadikan Akper YKY Yogyakarta menjadi Instansi Pendidikan yang terkemuka baik di tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional. Oleh sebab itu perlu diadakannya inovasi dalam bidang akademik, salah satu dari inovasi tersebut adalah mengembangkan dan meningkatkan PkM dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memenuhi indikator suatu perguruan tinggi yaitu adanya PkM dan pengabdian kepada masyarakat, yang didukung oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah yang sesuai untuk tahun 2016-2019 dan selanjutnya dalam rangka meningkatkan Program PkM dan Pengabdian Masyarakat untuk menjawab banyaknya persoalan-persoalan bangsa, oleh karena itu upaya-upaya kreatif Perguruan Tinggi Termasuk Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta perlu menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta baik didalam maupun diluar negeri.

Unit PkM dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta yang didirikan tahun 2011 bertekad untuk mengembangkan dan meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan Pendidikan PkM dan Pengabdian pada masyarakat berkompetitif dengan Instansi Perguruan Tinggi lain di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Menyikapi Era Global Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta berupaya dengan penuh semangat untuk berdiri sebagai perguruan tinggi yang bisa berkompetitif dengan perguruan tinggi lainnya untuk menjawab kebutuhan

– kebutuhan dan persoalan Bangsa melalui Tri Darma Perguruan Tinggi yang kompeten meliputi Pendidikan, PkM dan Pengabdian pada Masyarakat baik untuk kepentingan tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.

Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta merancang secara sistematis dalam rencana program kerja yang tersusun secara jelas dan dapat diukur target pencapaiannya. Program kerja tersebut meliputi :

1. Melakukan PkM dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Visi Misi Roadmap UPPM Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta.
2. Pengembangan Kualitas dosen / Peneliti melalui pendidikan / Pelatihan
3. Mengembangkan PkM dan Pengabdian Masyarakat melalui kerjasama Instansi/ Badan/ Lembaga / Pemerintah maupun Swasta yang terkait baik didalam maupun diluar negeri.
4. Melakukan publikasi hasil PkM pada Jurnal Ilmiah PkM baik di kawasan Regional dan bersifat Nasional dan atau Media masa sebagai sarana untuk mendesiminasikan hasil penemuan PkM dan Pengabdian Masyarakat guna pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sumber Daya Masyarakat.

Suatu perguruan tinggi sudah seharusnya melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi secara keseluruhan dengan melaksanakan pendidikan, PkM dan pengabdian pada masyarakat maka dari itu diperlukan kesadaran para dosen untuk meningkatkan, mengoptimalkan dan memanfaatkan sarana prasana yang ada di Unit PkM dan Pengabdian pada Masyarakat Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta yang memfasilitasi terlaksananya program PkM, bagi para dosen karena memang merupakan kewajiban dosen untuk memenuhi tugas Tri Darma Perguruan tinggi, Unit PPM Akper YKY Yogyakarta adalah sebagai pemantau, pengendali, pengkoordinasi serta memfasilitasi PkM dan pengabdian masyarakat bagi dosen di Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Ketrepaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi Akper YKY Yogyakarta harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya kearah itu dapat

dilakukan dengan strategi ke dalam kehidupan sosial dan saya saing Akper YKY Yogyakarta berdasarkan keunggulan.

Harapan tinggi terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat di Akper YKY Yogyakarta membutuhkan acuan berupa petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan pedoman pengabdian masyarakat 2019 UPPM Akper YKY Yogyakarta ini menjadi mutlak dilakukan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional PkM, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK 02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Tujuan penyusunan Pedoman PkM 2018 Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat Akper YKY Yogyakarta ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan PkM;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan PkM;
3. Menjadi acuan pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer serta tata
4. cara penilaian proposal PkM

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman PkM 2019 Unit PkM dan Pengabdian Masyarakat/UPPM Akper YKY Yogyakarta ini meliputi tahapan-tahapan PkM mulai pengajuan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga memuat mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* serta pembiayaan, perpajakan dan sanksi.

BAB II

KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

A. Arah Kebijakan PkM

PkM di lingkungan Akper YKY Yogyakarta diarahkan pada upaya mengawal kualitas PkM untuk:

1. Mewujudkan keunggulan PkM di Akper YKY Yogyakarta.
2. Meningkatkan daya saing Akper YKY Yogyakarta dalam PkM di tingkat Nasional maupun Internasional
3. Meningkatkan partisipasi Dosen dalam melaksanakan PkM yang Bermutu di Akper YKY Yogyakarta
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan PkM di Akper YKY Yogyakarta.
5. Mendukung potensi Akper YKY Yogyakarta untuk menopang pertumbuhan wilayah.

B. Sifat dan Ruang Lingkup

Sifat dan ruang lingkup PkM di Akper YKY Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Sifat PkM adalah asli, bukan duplikasi dari PkM lain, baik oleh dosen/peneliti sendiri atau dosen/peneliti lain, kecuali ada unsur pengembangan dari PkM sebelumnya
2. Seluruh materi PkM harus bebas dari plagiasi
3. Lingkup ilmu adalah bidang ilmu yang menjadi keahlian atau disiplin ilmu dari dosen/peneliti tersebut atau dapat melakukan PkM pada disiplin ilmu yang lain atas persetujuan UPPM dan tim penyeleksi.
4. Pembiayaan kegiatan PkM di tingkat internal Akper YKY Yogyakarta merupakan ajang pembekalan bagi para peneliti internal Akper YKY Yogyakarta untuk dapat bersaing di tingkat nasional meraih hibah-hibah PkM baik dari Kemenristek Dikti, maupun lembaga founding lain, industri dan pemerintah
5. Luaran kegiatan PkM yang dihasilkan diorientasikan untuk didaftarkan HaKi dan dipublikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi

C. Pembinaan Dosen

Sebagai upaya pembinaan dan peningkatan wawasan serta kemampuan metodologi PkM para dosen, maka Akper YKY Yogyakarta mengadakan berbagai upaya seperti:

1. Membentuk kelompok pelaksana PkM (*peer group*) yang disesuaikan dengan departemensasi keahlian dosen
2. Melaksanakan workshop dan pelatihan metodologi PkM
3. Melakukan strategi meraih hibah PkM dari pihak luar
4. Melakukan sosialisasi penerimaan hibah PkM dari Kemenristek Dikti maupun lembaga lain

D. Ketentuan Umum Pelaksana PkM

Pengusul proposal PkM di Akper YKY Yogyakarta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua adalah dosen tetap Akper YKY Yogyakarta
2. Anggota dapat Dosen Akper YKY Yogyakarta, diutamakan dari multi disiplin, atau dosen/pihak dari klinik/rumah sakit dengan pendidikan minimal S1/sarjana
3. Ketua hanya diperkenankan terlibat maksimum dalam 2 buah tim PkM dalam satu periode, satu sebagai ketua dan satu lagi sebagai anggota
4. Ketua yang belum menyelesaikan PkMnya secara resmi, tidak diperbolehkan mengajukan usulan PkM yang baru sebagai ketua
5. Bagi pelaksana PkM yang tidak dapat menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan surat perjanjian kontrak yang telah disepakati dengan UPPM, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam kontrak tersebut

E. Dana PkM

Dana PkM yang disediakan oleh Akper YKY Yogyakarta untuk pendanaan dana PkM dosen internal Akper YKY Yogyakarta sebagai berikut:

1. Dana pelaksanaan PkM hanya disediakan untuk usulan PkM yang telah diketahui oleh Ka UPPM dan disetujui Direktur.
2. Besarnya dana untuk satu judul PkM sejumlah Rp. 3.000.000,-/tahun

3. Dana PkM akan diturunkan melalui dua tahap, tahap I sebesar 70% pada saat proposal PkM telah diterima dan tahap II sebesar 30% pada saat penyerahan laporan akhir PkM dan Naskah Publikasi.
4. Besarnya dana PkM DRPM Hibah Kemenristek Dikti maupun lembaga lain diserahkan pada lembaga pemberi dana PkM

F. Jangka Waktu PkM

Jangka waktu untuk tiap jenis PkM di Akper YKY Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Pengabmas individu : insidental
2. Pengabmas institusi : maksimal 1 tahun ajaran
3. Pengabmas kerjasama : kondisional sesuai kontrak

Jangka waktu dari semua jenis PkM tersebut dihitung dari penandatanganan kontrak pelaksanaan PkM sampai laporan akhir PkM dengan persetujuan dari kepala UPPM Akper YKY Yogyakarta. Jangka waktu PkM di Akper YKY Yogyakarta diatur dalam kalender UPPM. Bila terdapat PkM yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka peneliti akan dikenai sanksi yaitu pemotongan dana PkM sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima.

G. Reviewer PkM

Setiap proposal PkM yang masuk ke UPPM Akper YKY Yogyakarta akan diproses oleh Ka. UPPM dan dinilai kelayakannya oleh reviewer yang sudah ditentukan. Aspek kelayakan awal yang dinilai oleh Ka. UPPM meliputi seluruh aspek proposal kecuali substansi isi (misalnya format halaman cover dan pengesahan, penulisan bab dan sub bab, penulisan gambar dan tabel, ukuran huruf dan sebagainya). Setelah dinilai layak oleh Ka UPPM, proposal kemudian dilanjutkan proses review-nya oleh reviewer. Adapun ketentuan reviewer PkM di Akper YKY Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Reviewer dipilih oleh Ka UPPM atas persetujuan Direktur dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan yang bersangkutan
2. Reviewer berasal dari kalangan Akper YKY Yogyakarta, Yayasan Keperawatan Yogyakarta dan atau institusi lain dengan ketentuan yang bersangkutan pernah melakukan pengabdian di DRPM minimal satu kali

dan mempunyai gelar akademik minimal S2 dan mempunyai jabatan akademik minimal lektor

3. Reviewer untuk PkM individu berjumlah 1 orang dan untuk PkM kerjasama berjumlah 2 orang.
4. Tugas dari reviewer adalah sebagai berikut :
 - a. Menilai kelayakan proposal PkM berdasarkan lembar penilaian kelayakan proposal PkM yang meliputi aspek substansi isi, biaya dan rencana *outcome* publikasinya
 - b. Menilai kelayakan laporan hasil PkM berdasarkan lembar penilaian kelayakan laporan hasil PkM

H. Sistem Penilaian

Sistem penilaian proposal PkM meliputi:

1. Penilaian format penulisan dan administratif, yaitu penilaian yang didasarkan atas kepatuhan dosen dalam memenuhi tertib format penulisan dan administrasi yang telah ditentukan oleh UPPM. Penilaian format penulisan dan administratif ini dilakukan oleh Ka. UPPM.
2. Penilaian substansi proposal yaitu penilaian didasarkan pada isi proposal, dilakukan dengan menilai proposal dari aspek isi, biaya dan rencana outcome publikasinya. Apabila lolos pada tahap *desk evaluation* (memenuhi *passing grade* yang telah ditentukan), maka pengusul harus mempresentasikan di sebuah seminar di hadapan reviewer dan dosen Akper YKY Yogyakarta. Penilaian substansi isi PkM ini dilakukan oleh tim reviewer dengan form yang telah disediakan UPPM. Satu pengabmas di nilai oleh 1 reviewer yang telah dipilih oleh UPPM.
3. Alokasi besaran dana didasarkan atas:
 - a. Ketersediaan alokasi dana
 - b. Pembiayaan yang didasarkan atas perkiraan penilaian yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) Grade A yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen)
 - 2) Grade B yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen)

- 3) Grade C yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen)
4. Tim penilai atau *reviewer* kemudian memberikan rekomendasi kepada UPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas; 1) hasil kelayakan secara substansi, 2) perkiraan kelayakan biaya PkM dan biaya output tambahan, dan 3) kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku untuk mendapatkan pendanaan.
5. Proposal PkM dinyatakan layak didanai jika nilai kumulatif (rata-rata) dari *reviewer* memenuhi *passing grade* (350) yang telah ditentukan

I. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Proses PkM

Monev proses PkM di Akper YKY Yogyakarta dilakukan sebagai berikut:

1. Kegiatan monev PkM dilaksanakan oleh UPPM
2. Monev untuk jenis PkM institusi Akper YKY Yogyakarta dilakukan pada akhir bulan ke empat setelah penandatanganan kontrak PkM
3. Monev PkMHibah bersaing institusi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh institusi pemberi dana dengan difasilitasi oleh Ka, UPPM

J. Publikasi Hasil PkM

Publikasi hasil PkM yang berlaku di Unit PPM Akper YKY adalah sebagai berikut:

- a. Semua hasil PkM yang didanai oleh Akper YKY Yogyakarta wajib dipublikasikan baik tingkat nasional, maupun internasional, baik jurnal belum terakreditasi maupun jurnal terakreditasi
- b. Jurnal hasil PkM dimasukkan ke dalam Perpustakaan dan Website Akper YKY Yogyakarta
- c. Luaran hasil PkM minimal berupa prosiding seminar atau publikasi di jurnal nasional/internasional
- d. Bukti sah publikasi berupa hardcopy/link softcopy prosiding atau jurnal yang dihasilkan
- e. Untuk publikasi hasil PkM ke jurnal internasional, Akper YKY Yogyakarta memberikan subsidi sebesar 50% untuk setiap jurnal yang dipublikasikan.

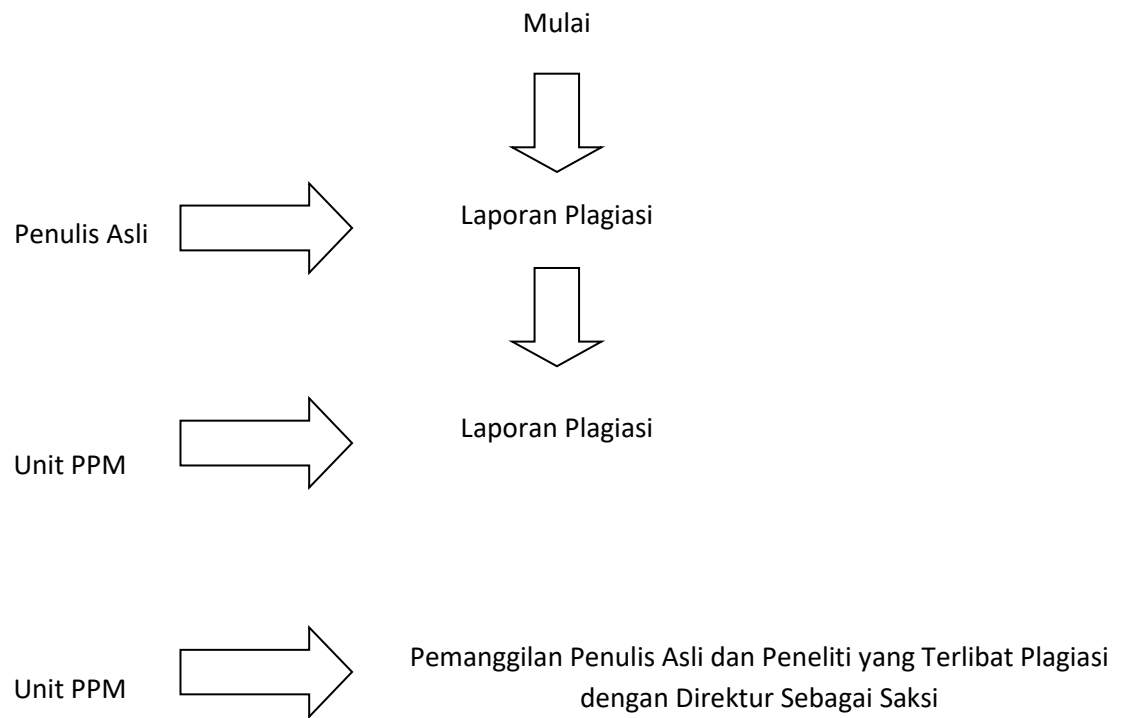
K. Pola Kerjasama dengan Pihak Luar (nasional dan internasional)

Sistem/pola kerjasama PkM dalam rangka mengembangkan dan membina jejaring PkM diatur sedemikian rupa melalui bentuk kesepakatan bersama (MoU) yang dibuat bersama antara pihak Akper YKY Yogyakarta dengan mitra. Setelah MoU tersebut disepakati dan ditandatangani bersama selanjutnya disusun kontrak kerjasama yang saling mengikat dan menguntungkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bersama. Sifat kerjasamanya bersifat khusus dan berkarakter sesuai bentuk kegiatannya, yang diatur kemudian dalam bentuk kontrak kerjasama setelah MoU disepakati bersama terkait manajemen, keorganisasian tim pelaksana, pembagian tugas dan hak, sharing pembiayaan, dan pelaporan. Tujuan dan sasarannya adalah meningkatkan daya saing dan mutu kegiatan PkM dan tata kelola lembaga yang lebih baik. Persetujuan tentang topik/objek yang diusulkan untuk dikerjakan bersama beserta tanda tangan pimpinan lembaga masing-masing disertakan dalam usulan, dan menjadi salah satu persyaratan administrasi agar usulan yang diajukan dapat diproses lebih lanjut sesuai karakter kegiatan ya

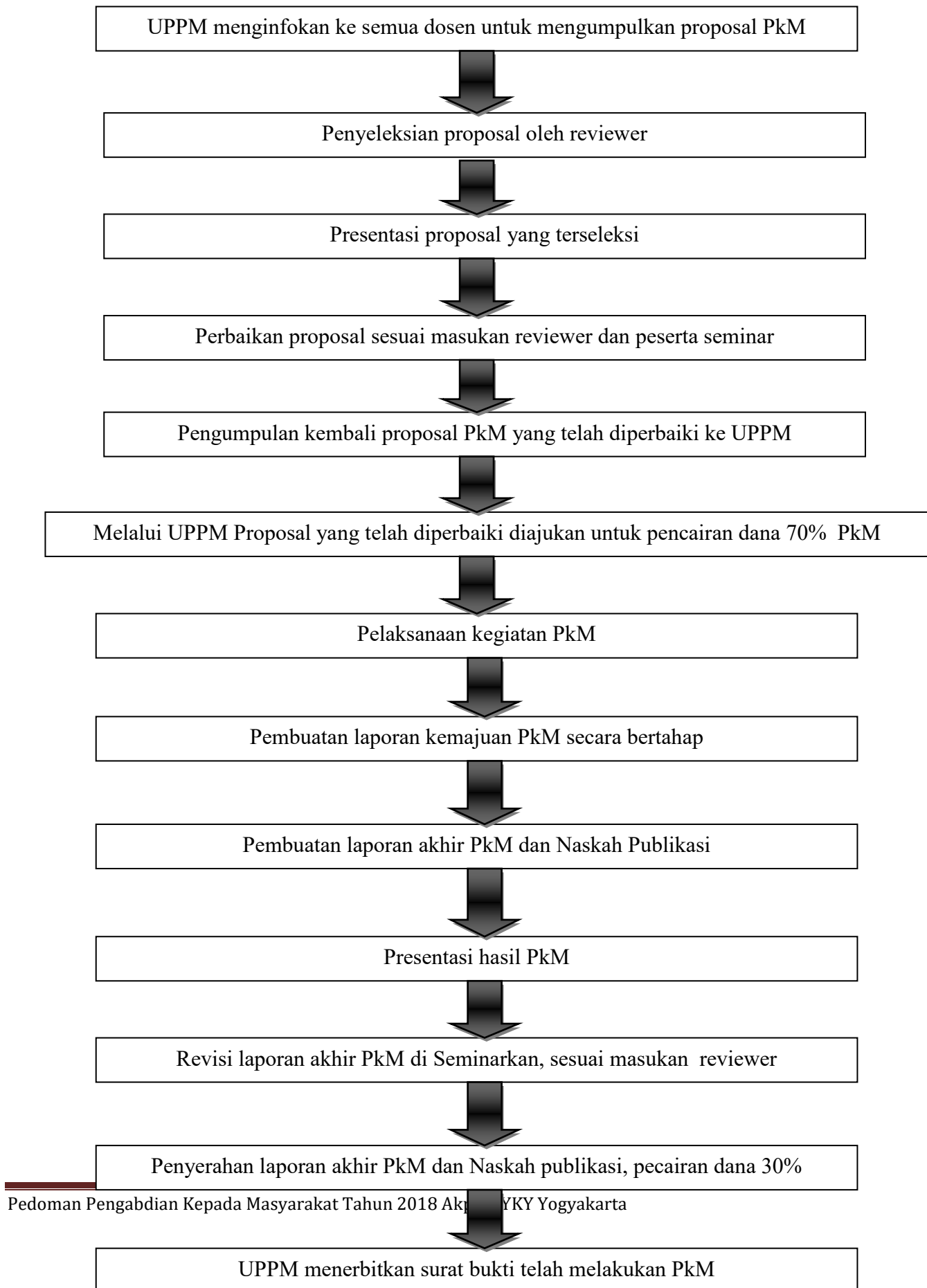
L. Penanganan Plagiasi

Penanganan plagiasi pada Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta adalah dengan pengembalian dana PkM yang sudah diterima kepada UPPM. Adapun bagan penanganannya sebagai berikut:

Prosedur Penanganan Plagiasi



Alur PkM Insitusi



BAB III

SKEMA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL PKM

A. PkM Institusi

1. Pengertian dan tujuan PkM

PkM individu merupakan PkM pada satu disiplin ilmu yang dilakukan secara individual. Tujuannya adalah untuk memberikan pembinaan bagi dosen atau peneliti muda, dan sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan PkM dengan baik serta menumbuhkan kemampuan dan budaya meneliti.

2. Ketentuan pengusul

Persyaratan dosen /peneliti pada jenis PkM ini adalah sebagai berikut :

- a. Dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional atau telah memiliki jabatan fungsional
- b. Dosen yang bersangkutan tidak sedang menerima sanksi administratif dan akademik
- c. Dosen DPK maupun dosen tetap yayasan yang telah memiliki NIDN/NIDK/dalam proses

3. Persyaratan

- a. Proposal PkM dengan cover warna hijau muda dengan format mengikuti buku panduan PkM Akper YKY Yogyakarta
- b. Berkas proposal diajukan kepada Direktur Akper YKY Yogyakarta dengan dilampiri proposal dalam bentuk hardcopy 2 (dua) eksemplark dan soft file
- c. Usulan PkM dapat dosen tunggal maupun tim, dosen hanya diperkenankan menjadi ketua peneliti 1 kali dan anggota PkM 1 kali dalam 1 tahun
- d. Judul usulan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pelaksana serta diprioritaskan untuk kemamfaatan masyarakat
- e. Format usulan mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Kemenristek Dikti Tahun 2018

4. Besaran Dana

Besaran dana yang dialokasikan untuk PkM institusi Akper YKY Yogyakarta setiap judul yang diajukan adalah Rp. 3.000.000,-

B. Pengabdian Desa Mitra Mono Disiplin Ilmu

Model pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen di lokasi desa mitra Akper YKY Yogyakarta. Tujuan pengabdian masyarakat model ini adalah untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa mitra Akper YKY Yogyakarta sekaligus sebagai sarana implementasi IPTEK bagi masyarakat untuk para dosen/pengabdi.

Persyaratan dosen/pengabdi untuk model pengabdian ini sebagai berikut:

1. Pengabdi adalah dosen Akper YKY Yogyakarta strata minimal S2 dan melibatkan mahasiswa sebagai asisten;
2. Pengabdian dilakukan secara individu atau tim (1-2 orang);
3. Luaran hasil penelitian berupa Poster A1 yang dipamerkan dalam acara seminar nasional Akper YKY Yogyakarta

C. Pengabdian Desa Mitra Multi Disiplin Ilmu

Model pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen di lokasi desa mitra Akper YKY Yogyakarta. Tujuan pengabdian masyarakat model ini adalah untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa mitra Akper YKY Yogyakarta sekaligus sebagai sarana implementasi IPTEK bagi masyarakat untuk para dosen/pengabdi.

Persyaratan dosen/pengabdi untuk model pengabdian ini sebagai berikut:

1. Pengabdi adalah dosen Akper YKY Yogyakarta) strata minimal S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor dan melibatkan mahasiswa sebagai asisten;
2. Pengabdian dilakukan secara tim dengan disiplin ilmu yang berbeda (≥ 2 orang);
3. Luaran hasil penelitian berupa Poster A1 yang dipamerkan dalam acara seminar nasional Akper YKY Yogyakarta

D. Pengabdian Institusi Mitra

Model pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen di institusi/lembaga desa mitra Akper YKY Yogyakarta. Tujuan pengabdian masyarakat model ini adalah untuk penguatan dan pemberdayaan institusi/lembaga yang ada di desa mitra .

1. Persyaratan dosen/pengabdi untuk model pengabdian ini sebagai berikut:
2. Pengabdi adalah dosen Akper YKY Yogyakarta strata minimal S2 dan melibatkan mahasiswa sebagai asisten;
3. Pengabdian dilakukan secara individu atau tim;
4. Luaran hasil penelitian berupa Poster A1 yang dipamerkan dalam acara seminar nasional

E. Pengabdian Kolaborasi Nasional

Model pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang bekerjasama dengan instansi pendukung seperti industri, pemerintah, dan instansi terkait lainnya. Tujuan model pengabdian ini adalah meningkatkan jejaring kerjasama antar lembaga dalam memaksimalkan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan sehingga diharapkan akan terbentuk desa mitra yang baru.

Persyaratan dosen/pengabdi untuk model pengabdian ini sebagai berikut:

1. Pengabdi adalah dosen Akper YKY Yogyakarta strata minimal S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor dan melibatkan mahasiswa sebagai asisten;
2. Pengabdian dilakukan secara tim dengan disiplin ilmu yang berbeda (≥ 2 orang);
3. Melampirkan surat kesediaan mitra pengabdian masyarakat;
4. Luaran hasil penelitian berupa Poster A1 yang dipamerkan dalam acara seminar nasional .

BAB IV

SISTEMATIKA DAN MUATAN PROPOSAL PKM

A. Bagian Depan

1. Sampul depan
 - a. **Warna sampul PkM individu putih polos**
 - b. **Warna sampul PkM institusi hijau muda.**
 - c. **Warna sampul PkM kerjasama abu abu**
2. Halaman pengesahan proposal PkM
 - a. **Identitas peneliti**
 - b. **Ketua peneliti**
 - c. **Alamat ketua**
 - d. **Jumlah anggota**
 - e. **Lokasi PkM**
 - f. **Lama PkM**
 - g. **Biaya yang diperlukan**
 - h. **Disetujui Ka UPPM Dan Direktur**
3. Bagian-bagian proposal
 - a. **Bagian pendahuluan**

Bagian ini meliputi halaman judul luar, halaman judul dalam, halaman pengesahan, ringkasan atau abstrak, dan daftar isi. Halaman judul luar dan dalam sebenarnya sama, hanya saja halaman judul luar biasanya menggunakan jenis kertas selain HVS, manila atau asturo misalnya. Sedangkan halaman judul dalam pencetakannya menggunakan kertas yang sama dengan jenis kertas halaman-halaman berikutnya, biasanya kertas HVS. Tidak semua proposal disertai ringkasan atau abstrak, artinya hal ini bersifat manasuka, tidak wajib. Proposal untuk tugas akhir misalnya, tidak disertai abstrak, tetapi proposal PkM bersifat kompetitif biasanya disertai abstrak. Demikian juga daftar isi, dalam suatu proposal bukan merupakan suatu bagian yang selalu disertakan.

Secara substantif, judul PkM hendaknya singkat, spesifik, dan jelas memberi gambaran kegiatan PkM yang diusulkan. Sebuah rambu-rambu dalam penulisan judul PkM maksimal sebanyak 20 kata (proposal *Program Kreativitas Mahasiswa* maksimal 12 kata). Adapun yang dimaksud spesifik adalah judul PkM difokuskan pada topik yang relatif tidak dapat dikhususkan lagi. Dengan demikian, judul PkM tersebut jelas menggambarkan apa yang akan dikerjakan..

Abstrak suatu proposal berisi latar belakang sangat singkat, tujuan PkM, landasan teori, metode PkM. Panjang abstrak suatu proposal PkM maksimal 400 kata atau 40 baris. Walaupun hanya sepanjang maksimal 400 kata, tetetapi harus dapat menggambarkan secara jelas apa yang akan dikerjakan, mengapa perlu kerjakan, bagaimana cara mengerjakan, di mana dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, dan apa hasil akhirnya atau kontribusinya.

b. Bagian Isi/batang tubuh

Bagian isi suatu proposal terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan PkM, hipotesis (untuk PkM kuantitatif merupakan keharusan), manfaat (kontribusi) ,tinjauan pustaka dan landasan teori, metode PkM, jadwal kegiatan, daftar pustaka, rencana anggaran biaya (jika ada), dan lampiran-lampiran.

c. Latar Belakang Masalah

Dalam latar belakang masalah dikemukakan hal-hal yang menjadi alasan pentingnya PkM tersebut dilakukan. Alasan penting tersebut berupa kesenjangan antara kondisi ideal (teoretis) dengan kondisi riil yang terjadi atau antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, dalam latar belakang kemukakanlah kondisi ideal tentang suatu hal. Usahakan kondisi ideal dilihat dari beberapa aspek atau sisi. Jika kondisi ideal sudah dikemukakan, selanjutnya kemukakanlah kondisi riil yang terjadi. Sama halnya dengan ketika mengemukakan kondisi ideal, dalam mengemukakan kondisi riil kemukakan dari berbagai sisi. Dengan dikemukakannya dua kondisi tersebut akan tampak kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi riil. Kesenjangan itu merupakan latar belakang masalah PkM.

Sebagai suatu bahan pertimbangan, suatu masalah layak diteliti perhatikan hal-hal berikut ini.

- 1) Orisinalitas masalah: apakah benar masalah yang ditentukan belum pernah diteliti;
- 2) Filosofi keilmuan: apakah benar masalah yang akan diteliti memenuhi jawaban lima macam kata ganti (5W+1H), yakni *what* ‘apa’, *who* ‘siapa’, *where* ‘di mana’, *why* ‘mengapa’, *when* ‘kapan’, *how* ‘bagaimana’;
- 3) Manfaat PkM (teoretis dan praktis)
- 4) Aktualitas masalah: apakah masalah yang dipilih benar-benar menarik pada saat PkM dilakukan; dan
- 5) Dana yang disediakan atau dianggarkan

Adapun masalah PkM dapat diperoleh melalui:

- 1) Bacaan, terutama laporan PkM;
- 2) Pertemuan ilmiah: diskusi, seminar, pelatihan dan sebagainya;
- 3) Pernyataan pemegang otoritas;
- 4) Pengamatan sepintas;
- 5) Pengalaman empiris peneliti;
- 6) Intuitif (perasaan)

d. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penjabaran lebih rinci dari permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang masalah. Perumusan masalah harus sangat spesifik. Akan tetapi, tingkat spesifikasi ini bersifat relatif. Perumusan masalah tidak selamanya dalam bentuk kalimat tanya walaupun pada umumnya menggunakan kalimat tanya.

Untuk merumuskan suatu masalah PkM, hal-hal berikut dapat sebagai suatu pegangan.

- 1) Rumusan masalah hendaklah padat dan jelas.
- 2) Rumusan masalah menghubungkan antara dua variable atau aspek.
- 3) Rumusan masalah hendaknya memberi petunjuk bagaimana cara pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

- 4) Rumusan disarankan menggunakan kalimat tanya.
- 5) Rumusan masalah dapat didahului latar belakang masalah secara singkat.

e. Tujuan

Perumusan tujuan harus paralel dengan perumusan masalah, pembahasan, dan penyimpulan, artinya jika rumusan masalah PkM tiga item, maka tujuan yang ditentukan pun tiga item. Perumusan tujuan harus jelas, tegas, dan spesifik. Pembahasan dan penyimpulan juga mencakup tiga hal yang sama. Di atas sudah dikatakan bahwa rumusan masalah pada umumnya dalam kalimat tanya, maka perumusan tujuan menggunakan kalimat deklaratif (berita). Dalam perumusan tujuan gunakanlah kata-kata yang bersifat operasional yang bersifat terukur, seperti *mendeskripsikan*, *menerangkan*, *menjelaskan*, *mengidentifikasi*, *merumuskan*, *mendisain*, dan sebagainya.

Tujuan dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan pernyataan umum yang hendak dicapai melalui PkM tertentu. Dengan demikian, sangat mungkin dalam satu proposal PkM atau satu kegiatan PkM hanya mempunyai satu tujuan umum. Adapun tujuan khusus merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan umum yang harus paralel dengan perumusan masalah PkM.

f. Manfaat

Istilah *manfaat* PkM terkadang diganti dengan istilah *kontribusi* atau *kegunaan* PkM. Pemahaman manfaat ini ada dua hal yaitu manfaat kadang hanya dilihat dari sisi praktis hasil PkM tersebut (Mukayat melalui Mantra, 2000) dan manfaat praktis dan teoretis sekaligus. Sebaiknya dalam merumuskan manfaat atau kontribusi PkM kemukakanlah dua manfaat karena suatu kegiatan PkM biasanya tidak akan terlepas dari peran teoretis hasil PkM tersebut, selain manfaat praktis. Akan tetapi, bisa saja suatu hasil PkM hanya mempunyai salah satu kontribusi, teoretis atau praktis bergantung jenis PkM tersebut, PkM dasar atau pembangunan. Contoh manfaat PkM di bawah ini mencakup manfaat teoretis dan praktis.

g. Hipotesis

Untuk memecahkan suatu masalah, perlu diketahui terlebih dahulu penyebab masalah tersebut. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masalah tersebut perlu diadakan PkM. Agar PkM dapat terarah, dirumuskan pendugaan terlebih dahulu terhadap penyebab terjadinya masalah itu yang disebut hipotesis. Hipotesis terdiri atas dua kata: *hipo* berarti keraguan dan *tesis* berarti kebenaran. Jadi, hipotesis berarti kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis akan ditolak jika salah, dan diterima jika fakta-fakta dalam PkM membenarkan. Jadi, penolakan dan penerimaan hipotesis sangat bergantung pada hasil-hasil PkM empiris.

Hipotesis dapat juga dipandang sebagai suatu konklusi yang sifatnya sementara. Sebagai kongklusi sudah tentu hipotesis tidak dibuat dengan semena-mena, tetapi atas dasar pengetahuan tertentu yang sebagian dapat diambil dari hasil-hasil PkM terdahulu, dan teori-teori yang relevan.

Hipotesis mempunyai fungsi pengarah yang memberikan batasan-batasan mengenai macam-macam data yang harus dukumpulkan, cara-cara pengumpulan data, dan teknik-teknik analisisnya. **Suatu hipotesis PkM ilmiah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya yang sangat penting adalah sebagai berikut.**

- 1) Hipotesis adalah hasil konstruksi dari gagasan-gagasan yang dapat diterangkan berdasarkan teori-teori atau hasil-hasil pengamatan tertentu.
- 2) Hipotesis harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan (*statement*), dan sama sekali tidak boleh merupakan kalimat pertanyaan.
- 3) Hipotesis selalu dikaitkan dengan keadaan dalam populasi, bukan hanya keadaan sampel (cuplikan) yang diteliti. Sampel PkM hanya berfungsi sebagai ajang atau wahana pengujian hipotesis. Hasil PkM pada sampel akan digeneralisasikan pada populasi sumber sampel yang diambil.
- 4) Dalam hipotesis harus dilibatkan sedikitnya dua variabel (ubahan).
Pernyataan yang hanya mengandung satu variabel tidak merupakan hipotesis yang perlu diuji.

- 5) Suatu hipotesis PkM harus dapat dites (*testable*). Agar suatu hipotesis dapat diuji, tiap-tiap variabel dalam hipotesis harus dapat ditentukan indikator-indikatornya atau ada instrumen atau metode untuk pengumpulan datanya
- 6) Hipotesis harus menyatakan secara tegas hubungan antarvariabel.
Dengan hipotesis yang definitif ini, pengujian dapat dilakukan dengan lebih saksama.

Sering timbul pertanyaan, “Apakah setiap PkM harus mempunyai hipotesis? Jika PkM merupakan PkM survai, maka harus mempunyai hipotesis. Akan tetapi, hipotesis dapat digantikan oleh rumusan masalah atau pertanyaan PkM.

h. Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

Dalam menulis proposal PkM, landasan teori dan tinjauan pustaka mempunyai peran strategis. Landasan teori dapat dianggap sebagai suatu pisau analisis yang menjadi kerangka atau disain PkM kita. Dengan kata lain, landasan teori dapat dianggap sebagai kaca mata yang dapat dipergunakan untuk meneropong suatu fenomena. Suatu fenomena yang sama jika didekati dengan teori yang berbeda, maka kemungkinan besar hasil atau temuan atau simpulannya akan berbeda pula.

Usahakan teori yang dijadikan landasan dalam suatu PkM langsung diambil atau dibaca dari sumber asli karena jika tidak dari sumber asli dikhawatirkan akan terjadi pemahaman yang tidak utuh atas teori tersebut sehingga terjadi distorsi. Selain itu, usahakan teori yang dijadikan landasan dalam proposal PkM diambil dari sumber-sumber terkini dari jurnal internasional. Mengapa disarankan jurnal internasional? Karena perkembangan terkini suatu teori tertentu akan dipublikasikan melalui jurnal tersebut dan kualitas karya ilmiah di dalam jurnal itu juga sudah teruji. Sumber lain yang layak dijadikan referensi dalam penulisan landasan teori yakni buku teks yang menyajikan teori tertentu. Buku teks semacam ini juga biasanya merupakan buku teks yang beredar dalam lingkup internasional. Buku teks internasional biasanya diterbitkan oleh beberapa penerbit di berbagai Negara.

Selain landasan teori, dalam suatu proposal PkM kenal pula istilah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka lebih cenderung berisi atau memaparkan studi-studi yang dilakukan sebelumnya terkait dengan PkM yang akan dilakukan oleh pengusul. Langkah ini sangat penting karena dapat untuk mengetahui aspek-aspek mana yang belum diteliti peneliti lain. Aspek-aspek itulah yang semestinya menjadi PkM pengusul. Dengan demikian langkah tersebut sebagai upaya untuk menentukan kesalihan topik PkM, artinya PkM yang akan dilakukan oleh pengusul bukan merupakan duplikasi dari peneliti-peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka dikenal juga dengan istilah studi empiris, sedangkan landasan teori dikenal pula dengan studi teoretis.

Landasan teori dan tinjauan pustaka diusahakan memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli, baik dari buku teks maupun jurnal ilmiah.
- 2) Uraikan dengan jelas landasan teori dan tinjauan pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari kegiatan PkM yang akan dilakukan.
- 3) Uraikan teori, temuan, dan bahan PkM lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan PkM yang diusulkan.
- 4) Uraian dalam landasan teori dan tinjauan pustaka digunakan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam kegiatan PkM.
- 5) Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka

i. Metode PkM

Kegiatan penelitian minimal melalui dua tahap, yakni pengumpulan data dan analisis data. Terkadang dijumpai pula tahap selanjutnya, yakni penyajian hasil analisis data. Tidak ada keharusan bagi pengusul PkM, apakah menggunakan dua tahap (pengumpulan dan analisis data) ataukah ketiganya dipergunakan. Satu hal yang menjadi pertimbangan adalah kebutuhan dalam

PkM tersebut, apakah dipandang cukup hanya dua tahap ataukah harus tiga tahap. Hal-hal tersebut disajikan di bawah ini.

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan satu tahap dalam PkM yang cukup krusial. Tahap ini dikatakan krusial karena berhasil dan gagalnya suatu PkM sangat bergantung pada tahap ini. Tahap ini merupakan tahap penjaringan data yang selanjutnya data tersebut dijadikan "**bahan baku**" dalam PkM. Data ini akan diolah (diproses) dan selanjutnya menjadi suatu informasi penting yang memberi petunjuk pada kita tentang *apa, siapa, mengapa, bagaimna*, dan di *mana* tentang suatu hal. Oleh karena itu, pengusul jangan sampai keliru dalam menentukan data yang akan dijaring dalam suatu PkM. **Metode** dalam pengupulan data cukup beragam bergantung disiplin ilmu dan data yang dibutuhkan. Akan tetapi semua metode itu bertujuan sama, yakni menjaring data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan PkM. Adapun metode-metode dalam pengumpulan data di antaranya: observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), naratif (bercerita), dan sebagainya.

Metode observasi dipergunakan untuk mengamati kondisi lingkungan atau daerah PkM secara umum, interaksi antaranggota masyarakat daerah PkM, aktivitas sehari-hari masyarakat daerah PkM, perilaku tertentu (verbal dan nonverbal) yang dibutuhkan sebagai data peneliti, dan sebagainya. Observasi dapat bersifat terbatas, artinya peneliti yang bertindak sebagai *observer* tidak terlibat dalam kegiatan *observee* (yang diamati)—selanjutnya dikenal sebagai observasi terbatas— dan observasi partisipatoris, artinya *observer* terlibat dalam aktivitas *observee*.

Metode wawancara mempunyai beberapa variasi yaitu wawancara terstruktur, wawancara mendalam, wawancara semiterstruktur. Istilah wawancara terstruktur kadang digunakan istilah wawancara tertutup; wawancara mendalam kadang digunakan istilah wawancara terbuka, walaupun tidak identik, sedangkan wawancara semiterstruktur dikenal juga sebagai wawancara semitertutup.

Wawancara terstruktur artinya wawancara yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket yang semua jawaban dari berbagai pertanyaan sudah disediakan, sehingga responden tinggal memilih. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara peneliti membuat pedoman wawancara (*interview guide*), semacam soal ujian esai (uraian), sehingga responden (lebih tepat informan) mengisinya dengan cara menjelaskan dengan bahasa mereka.

Wawancara semiterstruktur atau semitertutup adalah suatu metode wawancara dengan mengkombinasikan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam secara bersamaan. Penerapan metode ini melalui dua cara yaitu (a) bagian tertentu (bagian depan misalnya) merupakan wawancara terstruktur dan bagian akhir merupakan wawancara mendalam; (b) dalam item (nomor) tertentu dilanjutkan dengan wawancara mendalam karena peneliti menilai pertanyaan nomor tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Adapun diskusi kelompok terfokus penerapannya dengan cara mengumpulkan informan (lima sampai dengan 10 orang) untuk mendiskusikan masalah tertentu yang sudah disiapkan oleh peneliti dan dipandu oleh peneliti juga. Metode ini dapat dipergunakan untuk cek silang informasi atau data yang sudah diperoleh melalui wawancara mendalam, misalnya PkM tentang kekerasan dan eksploitasi terhadap PKL yang melibatkan informan pedagang kaki lima, Satpol PP, pejabat Pemda. Pertama peneliti mewawancarai isu tersebut secara tersendiri. Metode ini dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus antara ketiganya untuk mengecek kebenaran data dari masing-masing kelompok informan tentang kekerasan dan eksploitasi terhadap PKL.

2) Analisis Data

Metode yang dipergunakan pada tahap analisis data sangat beragam bergantung disain PkM dan tujuan PkM. Disain PkM studi kasus (kualitatif) biasa menggunakan analisis deskriptif, kategoris, dan pemaknaan secara teoritis fenomena yang menonjol. Analisis deskriptif ialah analisis dengan cara mendeskripsikan suatu gejala atau kondisi

secara objektif. Analisis ini dapat dianalogkan mengambil gambar suatu benda atau kondisi dengan kamera, sehingga hasil gambar tersebut sama dengan aslinya. Analisis kategoris dalam praktik sama dengan cara melakukan kategori-kategori sesuatu yang diteliti. Jika kita meneliti wujud kekerasan fisik yang dialami anak jalanan, dapat dikategorisasikan menjadi kekerasan berat, sedang, dan ringan. Sudah barang tentu dalam melakukan kategorisasi ini harus dengan indikator yang terukur.

Pemaknaan secara teoretis fenomena yang menonjol dilakukakan untuk memaknai hal-hal yang oleh peneliti dianggap menonjol, sehingga perlu mendapat penjelasan tertentu. Dalam menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan teori tertentu yang sudah ditetapkan dalam landasan teori. Tidak tertutup kemungkinan dalam memaknai suatu gejala dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, moral, agama, budaya dan sebagainya sehingga penjelasannya logis.

Dalam PkM dengan menggunakan desain PkM survai (kuantitatif) selain dapat menggunakan metode analisis di atas, juga menggunakan metode analisis statistik, seperti student T- test, *product moment*, , annova, dan sebagainya

3) Anggota PkM

Bagian ini memuat struktur organisasi dan personalia yang terlibat di dalam PkM, mulai dari ketua peneliti, anggota peneliti, tenaga laborat, tenaga lapangan dan tenaga administrasi

4) Rencana Anggaran Biaya

Sama halnya jadwal kegiatan PkM, rencana biaya yang dibutuhkan dalam PkM juga bersifat kondisional, artinya sesuai kebutuhan proposal tersebut. Proposal PkM disertai RAB jika proposal tersebut diajukan pada penyandang dana. Tetapi jika merupakan proposal kegiatan mandiri untuk memenuhi tugas akhir, item ini tidak dibutuhkan. Komponen pembiayaan dalam penelitian meliputi: bahan habis pakai (material PkM); alat tulis kantor (ATK), seperti pensil, *block note*,

penggaris, tinta, bolpoin, dan sebagainya; biaya perjalanan, gaji dan upah.

5) Lampiran-lampiran

Lampiran proposal PkM berisi:

- a) Instrumen PkM
- b) Justifikasi anggaran (tidak semua format proposal membutuhkan justifikasi anggaran). Akan tetapi, isi lampiran tidak selamanya demikian, tergantung ketentuan atau format yang dikeluarkan oleh penyandang dana.
- c) Jadwal kegiatan; mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan sebagai rincian kegiatan dan gambaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

BAB V

KAIDAH PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN PKM

A. Ketentuan Penulisan Proposal dan Laporan

1. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal dan laporan PkM dan pengabdian masyarakat sebagai berikut:
2. Naskah diketik di atas kertas HVS ukuran A4 70 gr, dalam satu muka (tidak bolak-balik);
3. Penulisan menggunakan huruf *Times New Roman* 12 untuk seluruh naskah, kecuali penulisan catatan kaki menggunakan huruf *Times New Roman* 10;
4. Tulisan disusun dalam jarak 1,5 (satu setengah) spasi;
5. Kutipan langsung yang lebih dari 5 baris diawali dengan baris baru dengan spasi 1 (satu), sedangkan kutipan langsung yang kurang atau sama dengan lima baris ditulis menyatu dengan alinea yang bersangkutan dan berada diantara tanda kutip;
6. Margin kiri dan atas adalah 4 cm, margin kanan dan bawah adalah 3 cm dari pinggir kertas; Ruang penulisan dimulai dari margin kiri dan berakhir pada margin kanan ruang penulisan; Garis batas untuk pembuatan catatan kaki berjarak 2 (dua) spasi di bawah uraian pokok dan 1 (satu) spasi di atas nomor catatan kaki; Penulisan laporan PkM dan pengabdian diharuskan menggunakan komputer, ketentuan format penulisannya tetap sama;
7. Penulisan naskah dibuat rata kiri dan kanan;
8. Proposal pengabdian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), sedangkan untuk proposal pengabdian 10 halaman tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran)
9. Laporan PkM minimal berjumlah 40 halaman (termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), sedangkan untuk pengabdian masyarakat 20 halaman (termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran).

B. Bahasa

1. Penulisan usulan dan laporan PkM dan pengabdian masyarakat harus mengikuti standar penulisan karya ilmiah, yaitu:

2. Penulisan proposal dan laporan PkM pengabdian masyarakat menggunakan bahasa Indonesia baku, sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);
3. Penyajian materi diuraikan dengan kalimat sempurna;

C. Penulisan Acuan

Penulisan acuan sebaiknya menggunakan “sistem penulis-tahun” yang mengacu pada karya pada daftar pustaka. Penulis harus mencantumkan halaman karya yang diacu. Dalam teks, karya yang diacu menggunakan ketentuan berikut:

1. Kutipan buku dalam bentuk saduran untuk satu sampai dua penulis ditulis nama akhir penulis dan tahun. Contoh: Haidar Nashir dituliskan (Nashir, 2007), Syafarudin Alwi dan Sutrisno Hadi dituliskan (Alwi dan Hadi, 1999) dan nomor halaman tidak perlu ditulis dalam penulisan acuan;
2. Untuk lebih dari dua penulis, maka penulisan ditambah dengan dkk. Contoh Edy Suandi Hamid, Sutrisno Hadi, Syafarudin Alwi, dituliskan (Hamid, dkk, 2000);
3. Untuk kutipan lebih dari dua sumber yang diacu secara bersamaan. Contoh Syafarudin Alwi dan Sutrisno Hadi dituliskan (Alwi, 1991; Hadi, 1994), dua tulisan atau lebih oleh satu penulis (Alwi, 1997; Alwi, 1998);
4. Apabila daftar acuan lebih dari satu tulisan oleh pengarang yang sama dalam tahun penerbitan yang sama, gunakan akhiran a, b, dan seterusnya setelah tahun acuan; Contoh: (Alwi, 1992a; Alwi, 1992b);
5. Kutipan yang berasal dari internet dituliskan dengan menyebutkan nama dan tahun. Jika tidak ada namanya, ditulis alamat website-nya

D. Penulisan Bab, Sub Bab, Sub-sub Bab

Penulisan bab, sub bab, sub-sub bab ditentukan sebagai berikut:

1. Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul proposal dan atau laporan PkM semuanya ditulis dengan huruf kapital, begitu juga judul pada setiap bab. Judul proposal dan laporan PkM ditulis simetris dengan huruf *Times New Roman* 14;
2. Penulisan nomor bab harus menggunakan angka Romawi (I, II, III, dst), sedangkan setiap subbab ditulis dengan angka arab 1.1, 1.2, 1.3, dst. Penulisan sub-subbab menggunakan angka Arab 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, dst, dan jika ada pemecahan maka digunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya); Jika ada

pemecahan lagi, penulisan dapat menggunakan huruf kecil (a, b, c, dan seterusnya). Penulisan sub-sub bab maksimum adalah 4 level; Contoh 1.1.1.1, 1.1.1.2, dan seterusnya.

3. Nomor dan judul bab ditulis secara simetris/rata tengah, sedangkan subbab dan sub-subbab dimulai dari batas tepi atau margin kiri ruang pengetikan dengan ditebalkan.
4. Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman judul proposal dan atau laporan PkM semuanya ditulis dengan huruf kapital, begitu juga judul pada setiap bab.

E. Penomoran Gambar dan Tabel

Penomoran gambar dan tabel mengikuti nomor bab yang bersangkutan. Misalnya Gambar 1.1, Gambar 1.2 terdapat di Bab I. Sedangkan Tabel 2.1, Gambar 2.2 terdapat di Bab II, dan selanjutnya. Penulisan judul tabel dan gambar ditulis simetris.

F. Penomoran Halaman

Penomoran halaman proposal dan laporan PkM ditulis dengan cara sebagai berikut:

1. Penomoran halaman untuk proposal dan laporan PkM adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian awal menggunakan angkaromawi kecil (i, ii, iii, dst);
 - b. Bagian isi dan daftar pustaka menggunakan angka arab (1,2,3, dst).
2. Letak nomor halaman proposal PkM dan laporan PkM diatur sebagai berikut:
 - a. Nomor halaman diletakkan di bawah tengah;
 - b. Lampiran diberi tanda dengan dituliskan lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya, yang penulisannya dilakukan di kiri atas, untuk nomor halaman lampiran diletakkan di bawah tengah.

G. Contoh Penulisan Daftar Pustaka

1. Buku referensi

Penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku referensi ditentukan sebagai berikut:

- a. Buku dengan satu penulis
Aunurrohman, C. (2007). *Malioboro: Soal Pembangunan Kawasan Pejalan Kaki dan Dusta Proyek-Proyek disana*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- b. Buku dengan dua penulis atau lebih
Crooks, R.& Baur, K.(1997). *Our sexuality* (6th ed). Brooks/Cole Publishing Company. Pasific Groove.

- c. Karya dalam antologi/kumpulan tulisan/buku
Lambert, M.J.& Bergin A.E. (1994). The effectiveness of psychotherapy. In A.E. Bergin & S.L. Garfiel (Eds), *Handbook of psychotherapy and behavior change* (pp. 143-189). New York: John Wiley & Sons, Inc
- d. Buku yang berisi kumpulan artikel (ada editornya)
Frey R., Ltruscoot, A F, & Kearse, A.L (Eds). (1976). *The official encyclopedia of bridge* (3 rd ed). New York : Crow Publishers,Inc.
- e. Buku dengan penulis dan penerbit sama
American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of metal disorder* (4th ed) Wasshington, D.C.
- f. Dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang dan lembaga
Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 1999, pasal 4(2) tentang ketenagakerjaan.(1990). Djembatan IKAPI.Jakarta.
- g. Karya yang ditulis dengan suatu lembaga sebagai pengarangnya
Universitas Surabaya. (1994). *Pedoman Akademik Universitas Surabaya*. Surabaya. Universitas Surabaya
- h. Skripsi/Tesis/Disertasi
Ernawati, S.Y. (1992). *Hubungan antara minat terhadap pelajaran matematika dan inteligensi dengan prestasi belajar matematika pada siswa kelas II di SMP kristen Perngadi Surabaya*. Skripsi, tidak dipublikasikan. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Surabaya

2. Makalah seminar dan lokakarya

Penulisan daftar pustaka yang berasal dari makalah seminar dan lokakarya ditentukan sebagai berikut:

- a. Hastjarja, T.D. (1991). *Pendekatan Psikofisika dan Kognitif terhadap Tingkah Laku Memilih*. Prosiding Lokakarya: Perkembangan Terakhir di Bidang Psikologi, Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta, 16-19 Juli 2011
- b. Karya terjemahan
Engel, J.F., Blackwell, R.D.& Miniard, P.W. (1994). *Perilaku Konsumen I*. Alih Bahasa: FX. Budiyanto Jakarta, Binarupa Aksara
- c. Artikel dari jurnal profesional
Frick, R.W. (1996). The Appropriate Use of Null Hypothesis Testing. *Psychological Method*, 4, 379-390

3. Artikel harian/mingguan/bulanan/tabloit

Penulisan daftar pustaka yang berasal dari makalah artikel harian/mingguan/bulanan ditentukan sebagai berikut:

a. Artikel dengan pengarang

Heru, W. (2006). Pelibatan Masyarakat dalam Pengaturan PKL (People Involvement in Arranging the Street Vending), Kompas Jawa Barat, 15 Maret, 2006

b. Artikel tanpa pengarang (dengan menyebutkan surat kabar)

Kompas. (1993). Efektif di Rumah dan di Kantor. Kompas Jawa Barat, 15 Maret 2011, hlm 50-52.

4. Artikel dari internet

Penulisan daftar pustaka yang berasal dari artikel dari internet ditentukan sebagai berikut:

Gorsevski, V., Taha, H., Quattrochi, D. and Luvall, J., (1998). Air Pollution Prevention through Urban Heat Island Mitigation: An Update on the Urban Heat Island Pilot Project, diakses pada tanggal 8 February 2012 dari http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/uhipp/epa_doc.pdf

5. Peraturan perundang-undangan

Penulisan daftar pustaka yang berasal dari peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

c. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan